

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Ahmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2019, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung Penerbit Nuansa
- Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, UMS Press
- Malayu S.P. Hasibuan, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara
- Mohamad, Ismail, *Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat*, 2003, Bandung, Mandar Maju.
- Moh. Mahfud MD, 1988, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press
- Philipus M.Hadjon., dkk. 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Ridwah HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers

S.F. Marbun, 2013, *Hukum Administrasi Negara II, Ctk ke-1*, Yogyakarta,

FH UII Press,

Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta,

Universitas Indonesia Press

Soemitro Ronny H, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,

Jakarta, Ghalia Indonesia

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Sri Hartini, dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta, Sinar

Grafika

Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cet I, Jakarta, PT.

Rineka Cipta

Titin Nur Hayda, 2012, *Kendala Dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin*

*Pegawai Negeri Sipil Daerah*, Fakultas Hukum, Universitas

Brawijaya

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Manajemen

PNS

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang;

Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS.

### **Internet**

M. Agus Yozami, <http://www.hukumonline.com>, SE Mendagri yang Meminta Agar PNS Tipikor Diberhentikan Secara Tidak Hormat, diakses pada 25 Oktober 2019, Pukul 18.00 WIB